



Dorong Pendirian RS Darurat

Sampai Tutup IGD, Tak Mampu
Terima Pasien Covid-19

JOGIA, Radar Jogja - Tidak hanya tabung oksigen yang habis di kalangan pedagang. Kapasitas tempat tidur rumah sakit pun kini penuh, dampak memuncaknya kasus Covid-19 di Kota Jogja. Akibatnya, tak sedikit ruang instalasi gawat darurat (IGD) tidak mampu menerima pasien lagi. **IN SIGHT** Baca Dorong... Hal 7

RS PENUH: Membeludaknya kasus Covid-19 menjadikan sejumlah rumah sakit rujukan tak mampu lagi menampung pasien yang datang. Rumah sakit darurat didorong untuk segera didirikan.



1.
2.
3.
4.
5.

Dak Lanjut

k Ditunggapi
k Diketahui
ya Pers

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Dorong Pendirian RS Darurat

Sambungan dari hal 1

Ini yang terjadi di RS PKU Muhammadiyah Kota Jogja, di mana sejak Sabtu (26/6) menutup layanan IGD akibat keterbatasan bed. Namun, mulai dibuka kembali dan menerima pasien per hari Minggu kemarin (27/6). "Sejak Sabtu ditutup sementara karena keterbatasan bed dan untuk mengurai penumpukan pasien di IGD. Tapi mulai Ahad sudah bisa menerima pasien kembali," ungkap Bagian Humas Pemasaran RS PKU Muhammadiyah Jogja Nunung Damayanti kepada *Radar Jogja* kemarin (27/6). Ia menjelaskan, pasien Covid-19

mengalami lonjakan di RS PKU Muhammadiyah. Sampai kewalahan mengatasi, ini karena layanan yang ada tidak sebanding dengan kapasitas bed untuk perawatan di rumah sakit. Selain karena keterbatasan tempat, juga tenaga kesehatan (nakes) yang menangani cukup minim dibandingkan dengan jumlah pasien yang masuk. "Kondisi kamar saat ini sudah *full* dan masih banyak pasien yang antri belum mendapatkan kamar," ujarnya.

Hingga kemarin *bed occupancy rate* (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur khusus pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan itu mencapai 80-90 persen, baik

ICU maupun non-ICU. Meski begitu, pihak manajemen rumah sakit sudah berencana menambah bed untuk mengatasi lonjakan pasien Covid-19. "Untuk oksigen sementara ini sudah tercukupi, meskipun sempat langka beberapa hari lalu," jelas Nunung.

Diharapkan dengan kondisi saat ini pemerintah terkait bisa memaksimalkan *stakeholder* yang ada untuk mengatasi pandemi ini. Termasuk mendorong diwujudkan rumah sakit darurat. "Rumah sakit darurat seperti ini diperlukan untuk mengatasi lonjakan pasien Covid-19 di DIJ. Mengingat banyak rumah sakit yang kewala-

han, karena keterbatasan tempat dan tenaga," katanya.

Hal senada direkomendasikan Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto yang mendesak Pemkot Jogja sebagai representasi negara agar bisa hadir dengan cepat untuk menyikapi polemik yang ada. Ia berharap gedung-gedung milik pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai selter atau membuat RS lapangan.

"Dari hasil penelusuran di lapangan hari ini, cukup banyak rumah sakit yang sampai menutup layanan ICU-nya, karena keterbatasan ruangan dan bed," kata-

nya. Pasalnya, daya tampung bed khusus untuk pasien Covid-19 sudah terisi penuh, baik ICU maupun non-ICU. Terlebih, antrean pasien di dalam sudah menumpuk. Demikian pula Selter Tegalarjo milik Pemkot Jogja juga tak tersedia ruang lagi, bahkan sampai antri masuk mencapai 36 pasien. "Persediaan oksigen dan ventilator juga semakin menipis. Lalu, sejumlah tenaga kesehatan terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri, seperti di Wiroso dan RS Pan-ti Rapih itu," tandasnya.

Dari hasil penelusurannya di lapangan hari Minggu (27/6) masih banyak rumah sakit yang menutup ICU-nya karena keter-

batasan ruangan dan bed. Perkembangan selama tiga hari ini (25-27 Juni), ia juga mengharapkan kepedulian dari wali kota dan wakil wali kota untuk dapat segera mengambil kebijakan cepat.

"Jangan sampai ada kesan *auto pilot* dalam penanganan Covid-19 di Kota Jogja. Hal yang simple saja untuk mengantar rakyat melakukan isolasi mandiri di selter dengan menggunakan ambulans yang layak. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat juga sudah kepayahan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan sedang mengupayakan penambahan bed untuk pasien

Covid-19. Komunikasi pun sudah dilakukan kepada tujuh rumah sakit rujukan di wilayahnya. Adapun yang sudah disanggupi minggu lalu ada 30 kamar di tujuh rumah sakit rujukan. "Semoga minggu-minggu ini kamar tambahan yang disanggupi sudah tersedia," katanya.

Sedangkan penambahan selter untuk orang tanpa gejala (OTG), pihaknya sudah mencoba meminjam lagi balai diklat Kementerian. Namun gagal karena masih digunakan untuk diklat OPD, Instansi, atau kementerian. "Sekarang kita maksimalkan dulu Balai RW atau RK di wilayah. Sudah dua minggu kami siapkan dan siap ditempati," jelasnya. (wla/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005